

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan nilai atas dasar harga konstan (harga konstan tahun 2000). Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

▪ PDRB Harga Berlaku

Di antara sektor-sektor pembentuk PDRB di Kota Balikpapan, bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota.

Sektor bangunan merupakan sektor yang mengalami kenaikan Berdasarkan Harga berlaku, pada tahun 2013 sektor ini mempunyai nilai

sebesar Rp.10.961.496,08 juta, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 37,69 % dari tahun sebelumnya sebesar 35,43%. Diproyeksi nilai sektor ini pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 12,014,875,43 juta, dan Rp. 13,430,324,17 juta. Sektor Perdagangan Hotel dan restoran pada tahun 2013 mempunyai nilai sebesar Rp. 8.302.663,84 Juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,55% dari tahun sebelumnya sebesar 29,62% dan di proyeksikan nilai sektor ini pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 8,911,410,27 Juta dan Rp. 9,495,018,41. Juta.

Sektor ketiga penyumbang PDRB kota Balikpapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2013 adalah sebesar 4.155.198,64 juta rupiah, sehingga andilnya mencapai 14,29 % Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008-2013 sebesar 14,38 %. Apabila dilihat dari komponen penyusunnya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang disumbangkan dari sektor ini adalah berasal dari Sub Sektor Angkutan khususnya angkutan udara dimana sub sektor angkutan udara pada tahun 2013 memberi kontribusi kepada sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 3,86 % dan proyeksi meningkat pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 50,84% dan 53,29%.

Tabel 3.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Balikpapan Tahun 2008-2013 dan Proyeksi 2014

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
1 PERTANIAN	656.090,55	670.993,06	711.348,42	740.874,28	776.321,93	776.321,95	834.188,46
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	18.298,97	20.750,77	26.526,51	29.438,10	31.660,68	35.593,39	39.256,08
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	23.363.550,22	19.502.198,35	21.635.247,63	22.845.840,45	21.451.149,21	24.200.210,40	23.300.499,30
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	273.377,86	295.683,81	332.535,71	432.050,89	478.331,27	521.099,23	577.452,90
5 BANGUNAN	4.020.949,64	4.881.071,23	5.866.067,68	7.279.238,72	9.356.005,53	10.961.496,08	12.014.875,43
6 PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	5.456.284,95	5.948.720,13	6.553.075,70	7.131.105,63	7.820.840,35	8.302.663,84	8.911.410,27
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.207.715,95	2.541.960,98	3.060.622,98	3.461.008,17	3.884.037,42	4.155.198,64	4.623.042,61
8 KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	1.311.097,28	1.451.461,75	1.603.953,56	1.773.958,93	1.905.199,15	2.026.001,35	2.189.185,80
9 JASA - JASA	1.220.585,87	1.283.015,56	1.318.750,73	1.483.223,74	1.578.769,15	1.663.837,60	1.751.203,82
Total PDRB	15.580.564,47	17.541.545,82	41.108.128,92	45.176.738,91	47.282.323,02	52.668.717,20	54.241.114,67

▪ **PDRB Harga Konstan**

PDRB harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Adapun tahun dasar yang ditetapkan adalah tahun 2000, mengingat kondisi

perekonomian nasional pada tahun tersebut lebih baik dan lebih stabil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstandi Kota Balikpapan Tahun 2008-2013 dan Proyeksi 2014

LAPANGAN USAHA		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
1	PERTANIAN	476.564,95	469.844,87	476.511,51	481.484,65	486.828,36	492.535,20	494.209,46
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5.830,83	6.165,57	6.595,56	6.999,24	7.435,29	7.895,53	8.273,97
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5.091.372,28	5.309.505,98	5.247.888,20	5.490.3356,66	4.873.751,90	4.870.045,10	4.683.610,93
4	LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	122.258,75	125.882,85	135.806,98	176.331,24	194.057,08	208.202,59	227.899,86
5	BANGUNAN	2.039.692,66	2.398.196,35	2.805.332,95	3.287.413,22	3.820.302,90	4.356.023,98	4.750.832,66
6	PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	4.029.528,74	4.265.807,29	4.441.552,90	4.686.030,95	4.863.573,67	5.003.775,67	5.247.674,39
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.725.660,94	1.922.729,24	2.135.984,88	2.276.943,56	2.549.892,58	2.737.994,93	2.923.381,38
8	KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	432.393,2	251.813,58	489.746,19	51 8.713,79	547.363,87	573.404,42	437.961,16
9	JASA – JASA	431.178,12	445.198,11	465.859,27	486.568,35	507.399,67	529.576,43	547.560,52
Total PDRB		9.551.793,79	10.390.239,95	16.205.278,43	17.410.820,65	17.850.605,31	18.779.453,86	19.321.404,34

*Keterangan : *Proyeksi*

Sumber BPS Kota Balikpapan

Sama halnya dengan PDRB harga berlaku, sampai dengan tahun 2013 sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB di Kota Balikpapan dengan peranannya sekitar 23,20% dan 26,64% berdasarkan harga konstan. Pada urutan ketiga adalah sektor angkutan dan komunikasi dengan peranannya sebesar 14,29%.

Secara keseluruhan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp. 18.779.453,86 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,06%. Diproyeksikan pada tahun 2014 PDRB Kota Balikpapan berdasarkan harga Konstan sebesar 19,321,404,34 juta rupiah pada tahun 2015 sebesar 20,165,003,41 juta rupiah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Besaran daya tumbuh yang diturunkan dari perubahan nilai PDRB Harga Konstan pada 2 (dua) titik waktu akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena indikator ini dapat memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun

menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan. Pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila laju pertumbuhan ekonominya tinggi, laju inflasinya rendah, penduduk miskin semakin berkurang dan tingkat pengangguran semakin rendah.

Tabel 3.3
Pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan Berdasarkan Harga Konstan (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	34,89	-1,41	1,42	1,04	1,11	1,17	0,85
Pertambangan dan Penggalian	6,30	5,74	6,97	6,12	6,23	6,19	6,25
Industri Pengolahan	1,38	2,02	1,63	1,98	-11,23	-0,08	0,67
Listrik, Gas & Air Bersih	0,99	2,96	7,88	29,84	10,05	7,20	4,05
Konstruksi & Bangunan	17,09	17,58	16,98	17,18	16,21	16,75	17,14
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,20	5,86	4,12	5,50	3,79	2,88	4,13
Angkutan & Komunikasi	10,83	11,42	11,09	6,60	11,99	7,38	9,20
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,20	6,83	6,03	5,91	5,52	4,76	3,73
Jasa-jasa	4,82	3,25	4,64	4,45	4,28	4,37	0,43
Pertumbuhan Ekonomi	10,14	8,78	8,34	8,61	8,66	9,03	8,81
<i>Keterangan : * Proyeksi</i>							
<i>Sumber BPS Kota Balikpapan</i>							

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini relatif cukup fluktuatif dan mengalami pasang surut meskipun pada empat tahun terakhir ini relatif cukup terjaga pertumbuhannya. Hal ini diduga sebagai dampak kontraksi perekonomian nasional dan adanya krisis keuangan internasional sehingga ikut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di daerah. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan periode tahun 2008-2013 mencapai 8,60%. Pada tahun 2008

pertumbuhan ekonomi sebesar 10,14 dikarenakan adanya peningkatan disektor pertanian dimana tanaman padi yang terdapat di Kota Balikpapan mengalami panen serentak dan terdapat moment nasional di Kota Balikpapan yaitu penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON), dan pada tahun 2009 mengalami perlambatan 1,36 point menjadi 8,78 % setelah itu yaitu sampai tahun 2012 pertumbuhan mengalami peningkatan walaupun kecil dan dapat dikatakan relatif stabil sementara pada tahun 2013 perekonomian di kota Balikpapan diharapkan dapat tumbuh. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan tersebut maka perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kembali gairah percepatan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai keberhasilan pembangunan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi yang mampu mengoptimalkan lahan dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dan produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

c. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

Kesembilan sektor yang ada, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor utama, yaitu: (i) Sektor Primer, (ii) Sektor Sekunder, dan (iii) Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kelompok Sektor Sekunder terdiri dari sektor Industri Pengolahan, Listrik dan Air, serta Bangunan. Kelompok Sektor Tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa.

Tabel 3.4
Kontribusi Sektoral PDRB di Kota Balikpapan

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014*)</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Pertanian	1,70	1,84	1,73	1,64	1,64	1,52	1,92
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,11
Industri Pengolahan	60,64	53,40	52,63	50,57	40,73	45,95	46,04
Listrik, Gas & Air Bersih	0,71	0,81	0,81	0,96	1,91	0,99	1,10

Konstruksi & Bangunan	10,44	13,36	14,22	15,80	17,76	20,81	20,35
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,16	16,29	15,88	16,33	14,85	15,76	15,44
Angkutan dan Komunikasi	5,73	6,89	7,42	7,66	7,37	7,89	7,92
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,40	3,97	3,89	3,93	3,62	3,85	3,91
Jasa-jasa lainnya	3,17	3,39	3,20	3,28	3,00	3,16	3,21
Total	100	100	100	100	100	100	100
<i>Keterangan : * Proyeksi</i>							
<i>Sumber BPS Kota Balikpapan</i>							

Pada tabel III memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terjadi Pergeseran peranan yang mengalami peningkatan adalah sektor konstruksi dan bangunan terhadap sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor yang lainnya berfluktuatif dan masih dapat dikatakan relatif stabil

Pada beberapa tahun terakhir ini, di Kota Balikpapan terdapat sedikit pergeseran struktur ekonomi pada kelompok sektor yaitu pada kelompok sektor tersier menuju ke sekunder hal ini dikarenakan adanya pergeseran pada sektor konstruksi dan bangunan terhadap perdagangan, hotel dan restoran.

Besarnya presentase Kontribusi kedua sektor tersebut (sektor sekunder & sektor tersier) terhadap perekonomian kota Balikpapan, menunjukkan kota Balikpapan menuju pada kota yang modern atau menuju kota metropolitan.

Tabel 3.5
Kontribusi Terhadap Perekonomian

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Primer	674.389,52 (4,33)	691.743,83 (3,94)	737.874,93 (3,69)	770.312,38 (3,37)	807.982,61 (3,06)	838.210,06 (2,84)	829.647,50 (2,57)
Pertanian	656.090,55	670.993,06	711.348,42	740.874,28	776.321,93	802.616,67	793.919,02
Pertambangan dan Penggalian	18.298,97	20.750,77	26.526,51	29.438,10	31.660,68	35.593,39	35.728,48
Sekunder	4.710.490,90 (30,23)	5.624.643,57 (32,06)	6.723.136,74 (33,62)	8.263.270,77 (36,11)	10.403.118,94 (39,41)	35.682.805,71 (42,19)	14.277.945,36 (44,22)
Industri Pengolahan	416.163,40	447.888,53	21.635.247,63	22.845.840,45	21.451.149,21	24.200.210,40	599.348,28
Listrik, Gas dan Air Bersih	273.377,86	295.683,81	332.535,71	432.050,89	478.331,27	521.099,23	911.280,55
Konstruksi dan Bangunan	4.020.949,64	4.881.071,23	5.866.067,68	7.279.238,72	9.356.005,53	10.961.496,08	12.759.316,53
Tersier	10.195.684,05 (65,44)	11.225.158,42 (63,99)	12.536.402,97 (62,69)	13.849.296,47 (60,52)	15.188.846,07 (57,33)	31.996.991,33 (54,97)	17.168.929,39 (53,21)

Perdagangan, Hotel & Restoran	5.456.284,95	5.948.720,13	6.553.075,70	7.131.105,63	7.820.840,35	8.302.663,84	8.410.961,30
Angkutan dan Komunikasi	2.207.715,95	2.541.960,98	3.060.622,98	3.461.008,17	3.884.037,42	4.155.198,64	4.845.144,80
Keuangan, Perse-waan & js. Pershn	1.311.097,28	1.451.461,75	1.603.953,56	1.773.958,93	1.905.199,15	2.026.001,35	2.156.713,73
Jasa-jasa	1.220.585,87	1.283.015,56	1.318.750,73	1.483.223,74	1.578.769,15	1.663.837,60	1.756.109,56
Total	15.580.564,47	17.541.545,82	41.108.128,92	45.176.738,91	47.282.323,02	52.668.717,20	32.268.522,26
Keterangan : * Proyeksi Sumber BPS Kota Balikpapan, data diolah							

Kurun waktu lima tahun terakhir 2008-2012, pada tahun 2008 kontribusi sektor primer mencapai 4,33 % hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian mencapai sebesar 51,40% setelah tahun 2008 yaitu dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor primer cenderung mengalami perlambatan dimana rata-rata pertumbuhan kelompok primer lebih kurang 4,62% per tahun. Pada kelompok sektor sekunder, rata-rata pertahun mencapai 21,91 % Pada kelompok sektor terakhir atau sektor tersier mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,48%. Kelompok sektor tersier masih menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kota Balikpapan begitu pula dengan prediksi tahun 2013-2014. Berturut – turut pada tahun 2013 dan 2014, kelompok ini bisa menyumbang /memberi kontribusi PDRB Kota Balikpapan sebesar 54,97% dan 53,21%. Penurunan kontribusi pada tahun 2013-2014 disebabkan karena adanya peningkatan kontribusi kelompok sekunder yang meningkat kontribusinya dari sebesar 39,41% berdasarkan harga berlaku pada tahun 2012, diprediksikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 42,19 % dan pada tahun 2014 sebesar 44,22%. Peningkatan kontribusi sektor sekunder ini banyak disumbang oleh sektor listrik, gas dan air bersih yang pada tahun 2013 -2014 diprediksikan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 38,66% dan 39,50% berdasarkan harga berlaku.

Struktur perekonomian daerah telah mengalami pergeseran kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB di Kota Balikpapan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kelompok sektor berfluktuatif. Pada tahun 2012, sektor primer mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 807.982,61 juta, sementara berdasarkan harga konstan, kontribusi yang diberikan oleh sektor primer tersebut sebesar Rp. 494.263,65 juta.

Pada tahun 2012 pertumbuhan kelompok primer berdasarkan harga berlaku sebesar 4,89 % sementara pertumbuhan berdasarkan harga konstan

sebesar 1,18%. Pertumbuhan untuk sektor ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 diprediksi sektor ini mengalami perlambatan sebesar 1,32% dan tahun 2014 diprediksi mengalami perlambatan 1,34% berdasarkan harga berlaku dengan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor primer pada tahun 2013 sebesar 818.668,61 juta dan tahun 2014 diprediksi sebesar 829,647,50 juta rupiah.

Tidak demikian dengan sektor sekunder dimana kelompok sektor sekunder mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 sektor ini mengalami peningkatan sebesar 2,99 digit point dari tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya pada tahun 2012 sebesar 25,90 %. Pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku sementara berdasarkan harga konstan sebesar 14,66%. Prediksi pada tahun 2013 dan 2014 dengan kontribusi yang diberikan oleh kelompok sektor ini sebesar 12.166,747,37 juta rupiah dan 14.269.945,36 juta rupiah sehingga pertumbuhannya pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 16,95% dan pada tahun 2014 diprediksi mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 0,33 point sehingga pada tahun 2014 diprediksi mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,29% berdasarkan harga berlaku. Dipredikasikan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kelompok sektor sekunder pada tahun 2013 adalah sektor bangunan , yang mana pada tahun 2013 diprediksi memberi kontribusi sebesar 37,89%, Prediksi tahun 2014 sektor bangunan tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi , sektor ini memberi kontribusi sebesar 39,54%

Kelompok sektor tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa. Pertumbuhan sektor tersier yang positif ini membuat sektor sekunder yang beberapa tahun terakhir ini mengalami sedikit penurunan. Sektor tersier mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,48% berdasarkan harga berlaku atau sebesar 6,35% per tahun berdasarkan harga konstan. Kontribusi yang diberikan sektor ini pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku sebesar 15.188.846,07 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1.339.549,60 juta rupiah. Sektor ini tumbuh sebesar 9,67 % atau mampu memberikan kontribusi pada PDRB Kota Balikpapan sebesar 57,53%.

Berdasarkan harga konstan sektor primer ini berkontribusi terhadap PDRB sebesar 63,75% atau 8.468.229,78 juta rupiah. Nilai ini meningkat 499.973,14 juta rupiah dari tahun sebelumnya dan meningkat sebesar 0.50 point dari kontribusi yang disumbangkan pada tahun 2011. Pada tahun 2013

berdasarkan harga berlaku diprediksi kelompok sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15.849.289,90 atau mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Balikpapan sebesar 54,97%. Kelompok sektor ini mengalami pertumbuhan melambat sebesar 4,35%. Sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 10,48 % berdasarkan harga berlaku atau sebesar 6,29% berdasarkan harga konstan sedang prediksi tahun 2014 sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 17.168.929,39 juta rupiah. Pada tahun 2012 Kontribusi terbesar sektor tersier ini disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu memberikan kontribusi sekitar 29,62%. Pada tahun 2013 dan 2014 diprediksi kelompok sektor tersier mengalami sedikit penurunan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan, yang semula pada tahun 2012 sebesar 57,97% menurun menjadi 54,97% dan 53,21%. Penurunan peranan sektor tersier tersebut pada tahun 2011 disebabkan meningkatnya kembali sektor sekunder.

Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 yang bergerak positif dan membawa harapan keadaan perekonomian di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang jauh lebih baik dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 8,66% pada tahun 2013 meningkat sebesar 9,03% sementara pada tahun 2014 dipredikasi perekonomian di Kota Balikpapan mengalami perlambatan sebesar 8,81 % walaupun pertumbuhannya melambat tetapi nilai PDRB nya mengalami peningkatan 15.758.276,92 juta rupiah dari prediksi tahun 2013 sebesar 14.482.965,50 juta rupiah.

Tabel 3.6
Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasar Kelompok Sektor Ekonomi di Kota Balikpapan atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2008– 2013 dan proyeksi Tahun 2014 (Juta)

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Primer	482.395,78 (5,05)	476.010,44 (4,58)	483.107,07 (4,29)	488.483,88 (4,00)	494.263,65 (3,72)	500.430,73 (3,45)	502.483,39 (3,20)
Pertanian	476.564,95	469.844,87	476.511,51	481.484,65	486.828,36	492.535,20	494.209,46
Pertambangan dan Penggalian	5.830,83	6.165,57	6.595,56	6.999,24	7.435,29	7.895,53	8.273,97
Sekunder	8.046.169,26 (25,66)	7.833.585,18 (27,13)	8.189.028,13 (28,79)	8.954.080,07 (30,83)	8.883.961,91 (32,53)	9.534.780,72 (34,40)	9.662.343,45 (36,53)
Industri Pengolahan	5.884.217,85	5.309.505,98	5.247.888,20	5.490.335,66	4.873.751,90	4.870.045,10	4.683.610,93
Listrik, Gas dan Air Bersih	122.258,75	125.882,85	135.806,98	176.331,24	189.907,11	204.531,98	227.899,86
Konstruksi dan Bangunan	2.039.692,66	2.398.196,35	2.805.332,95	3.287.413,22	3.820.302,90	4.460.203,64	4.750.832,66
Tersier	6.618.761,00 (69,29)	7.095.639,76 (68,29)	7.533.143,23 (66,92)	7.968.256,64 (65,18)	8.468.229,79 (63,75)	8.844.750,69 (62,15)	9.156.577,45 (60,26)
Perdagangan, Hotel & Restoran	4.029.528,74	4.265.807,29	4.441.552,90	4.686.030,95	4.863.573,67	5.003.775,67	5.247.674,39
Angkutan dan Komunikasi	1.725.660,94	1.922.729,24	2.135.984,88	2.276.943,56	2.549.892,58	2.737.994,17	2.923.381,38

Keuangan, Perse-waan & js. Pershn	432.393,20	461.905,12	489.746,19	518.713,79	547.363,87	573.404,42	437.961,16
Jasa-jasa	431.178,12	445.198,11	465.859,27	486.568,35	507.399,67	529.576,43	547.560,52
Total	15.147.326,04	15.516.734,70	16.205.278,43	17.410.820,65	17.850.605,31	18.779.453,86	19.321.404,34

d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Meski nilai yang diperoleh belum tentu mencerminkan nilai yang benar-benar diperoleh masyarakat, setidaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sementara yang dimaksud pendapatan, adalah Nilai Tambah Bruto/ NTB (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Pendapatan Perkapita Tahun 2008 - 2014

Tahun	Pendapatan Perkapita
2008	21.369.170
2009	24.030.199
2010	27.654.236
2011	31.795.728
2012	36.708.258
2013	39.844.630
2014*	43.689.000
<i>Keterangan : * Proyeksi</i>	
<i>Sumber: BPS Kota Balikpapan, Analisis, data diolah</i>	

Pendapatan per kapita penduduk Kota Balikpapan dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan dapat dilihat dari tabel diatas dimana diprediksi tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 14,16%

e. Perkembangan Harga (Inflasi)

Inflasi adalah kenaikan harga - harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang - barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi sering dihitung dengan mempergunakan Indek Harga Konsumen (IHK) atau Cunsomer Price Index

(CPI). Inflasi merupakan hasil perbandingan indeks harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK.

Tabel 3.5	
Tingkat Inflasi Kota Balikpapan	
Tahun	Inflasi
(1)	(2)
2008	11,30
2009	3,60
2010	7,38
2011	6,45
2012	6,41
2013	8,56
2014*	5,10
2015**	5,80

Sumber: BPS Kota Balikpapan, Analisis, data diolah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 7,06% dengan tingkat inflasi sebesar 8,56%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diprediksijadi sebesar 8,81 % sementara tingkat inflasi adalah 5,10% dan pendapatan perkapita tumbuh sebesar 8,3%. Dengan terjadinya penambahan pendapatan perkapita untuk prediksi tahun 2014 dan 2015 berarti telah terjadi penguatan daya beli masyarakat kota Balikpapan sehingga dengan demikian diharapkan kondisi perekonomian di Kota Balikpapan juga akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

Kondisi perekonomian di Kota Balikpapan secara umum tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat atasnya atau kondisi perekonomian global. Berbagai instrumen yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian antara lain: stabilitas nilai tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

f. Investasi

Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi

pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

PDRB sektor investasi dibentuk oleh dua sektor utama, yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok (Perubahan stok ini meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi). Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (region) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap - tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.

Tabel 3.8
Pertumbuhan Investasi

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Investasi	4.561.487,58	4.615.429,86	5.053.869,06	5.682.997,60	5.734.554,76	6.032.086,92	6.352.076,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.158.559,25	4.311.137,77	4.535.437,65	4.783.708,39	4.876.595,93	5.169.191,69	5.355.125,66
Perubahan Stok	402.928,33	304.292,09	518.431,41	889.588,54	857.958,83	862.895,23	867.678,21

Secara rata-rata pertumbuhan investasi selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 sebesar 6,33 % per tahun, sedangkan secara kumulatif mencapai 36,88 %. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok Barang memiliki kontribusi 84,79 % dan 8,05 % terhadap kegiatan investasi kota Balikpapan yang mencapai 14,75 % pada tahun 2012.

g. Perdagangan Internasional (Exspor)

Nilai ekspor atas dasar harga berlaku Kota Balikpapan tahun 2013 diproyeksi sebesar Rp. 41.578.870,29 juta rupiah, lebih tinggi dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 39.831.856,93 juta rupiah dan tahun 2014 nilai ekspor atas dasar harga berlaku diproyeksi sebesar 58.761.351 juta rupiah dan import sebesar 23.418.821 juta rupiah.

Jika dihitung atas dasar harga konstan, nilai ekspor pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.819.717,15 juta rupiah, lebih tinggi dari ekspor tahun 2012 sebesar Rp. 15.430.933,16 juta rupiah dan pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 58.254.143 juta rupiah. Sementara itu, nilai impor atas dasar harga konstan Tahun 2013 sebesar Rp. 8.964.880,39 juta rupiah

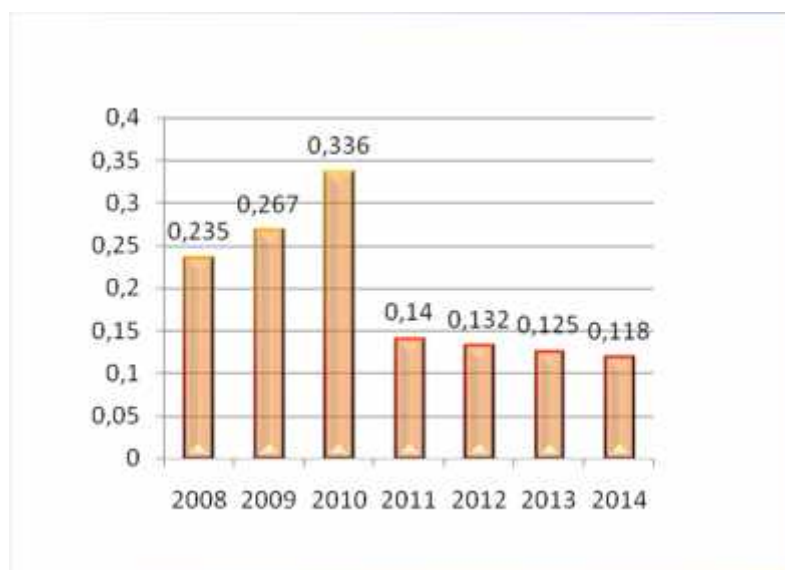
melampaui nilai ekspor pada tahun 2012 sebesar 8.076.468,82 juta rupiah dan pada tahun 2014 diproyeksi sebesar 21.641.121 juta rupiah.

h. Indeks Gini (Gini Ratio / Gini Index)

Ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 tergolong rendah, meskipun Indeks Gini sedikit meningkat dari 0,267 di tahun 2009 menjadi 0,33 di tahun 2010 (nilai gini antara 0,20 - 0,35 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/ pemerataan pendapatannya relatif sama, Todaro P. Michael, 1994). Sebagai salah satu wilayah perkotaan biasanya dicirikan dengan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten, karena masyarakat di kota mempunyai kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih heterogen dibandingkan wilayah kabupaten. Wilayah perkotaan ditandai dengan banyaknya lapangan kerja formal yang memberikan pendapatan/ upah yang berbeda untuk jenis pekerjaan tertentu.

Jika kita lihat tingkat pemerataan pendapatan yang dicapai di Kota Balikpapan relatif baik. Penilaian indikator ini dengan menggunakan Indeks Gini Ratio ,dimana angka koefisien gini Ratio kota Balikpapan dari selama periode 2008-2012 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien gini rasio maka kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan tahun 2011 -2012 dibawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan. Walaupun distribusi pendapatan masih terkonsentrasi pada golongan berpendapatan menengah dan tinggi . dan pada tahun 2013-2014 diproyeksi berada $G < 0,3$ untuk itu dapat dilihat grafik gini ratio berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan



Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

Melihat perkembangan perekonomian Kota Balikpapan Tahun 2008-2014, bagaimana prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015-2016

Diperkirakan perekonomian Kota Balikpapan masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan isu perekonomian Indonesia terutama isu kenaikan BBM. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, industri, perdagangan, jasa. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.

- Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi yang ramah lingkungan bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Balikpapan, di samping menciptakan lapangan kerja.
- Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Balikpapan.
- Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Balikpapan sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015-2016

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013 dan proyeksi 2014 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka Prospek perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai Produk domestik regional Bruto dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,91% pada tahun 2015;
- Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan pada kisaran dibawah dua digit yaitu sekitar 5%.
- PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015-2016 diperkirakan sebesar Rp.57.293.877,14 juta Dan Rp 60.339.586,38 Juta;
- PDRB Harga Konstan pada tahun 2015-2016 diperkirakan sebesar Rp. 20.165.003,41 juta dan Rp. 20.917.327,86 Juta;

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan

pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- o Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
- o Disusun berdasarkan pendekatan kinerja

- o Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- o Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2014 di Kota Balikpapan diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan good governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya. (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Balikpapan

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN ANGGARAN 2014
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	231.674.530.575,89	340.503.244.597,14	470.465.949.932,97	450.420.951.741,00
1.1.1	Hasil Pajak daerah	170.370.071.078,00	261.094.566.470,47	340.998.751.947,69	298.029.544.611
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.442.311.854,00	43.287.221.029,00	57.378.640.539,94	71.482.371.579
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.875.961.842,68	13.191.116.874,76	17.191.752.156,80	29.500.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	23.986.185.801,21	22.930.340.222,91	54.896.805.288,54	51.409.035.551
1.2	Dana Perimbangan	1.151.703.793.532,,00	1.338.672.315.591,00	1.281.536.428.792,00	1.176.771.223.989
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	875.545.969.532,00	783.883.093.082	831.216.372.792,00	718.799.721.989
1.2.2	DAU	268.229.224.000,00	385.085.246.000,00	427.133.126.000,00	449.982.262.000
1.2.3	DAK	7.928.600.000,00	13.459.300.000,00	23.186.930.000,00	7.989.240.000

1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	415.610.143.290,00	433.792.294.200,00	669.955.801.300,00	450.234.920.300
1.3.1	Hibah	3.000.000.000,00	0	0	8.900.000.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0		0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	192.223.656.000,00	219.690.340.000,00	336.773.634.300,00	241.017.600.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88.147.637.290,00	63.214.153.000,00	93.623.367.000,00	93.623.367.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	132.238.850.000,00	150.887.801.200,00	239.558.800.000,00	106.693.953.300
	PENDAPATAN DAERAH	1.798.988.467.397,89	2.205.153.356.919,20	2.421.958.180.024,97	2.077.427.096.030

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Balikpapan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Balikpapan diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Balikpapan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Balikpapan. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Balikpapan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Restoran;
- 3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 5) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
- 8) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 12) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 13) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 14) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 15) Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada

terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi daerah, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak daerah baru/potensial dan jumlah pembayar pajak daerah, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Wali Kota dan mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak daerah melalui penyederhanaan administrasi pajak daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Balikpapan.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011-2014 di Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel III.16 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Proporsi PAD terhadap APBD

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
01.	2011	231.674.530.575,89	1.798.988.467.397,89	12,84
02.	2012	340.503.244.597,14	2.205.153.356.919,20	15,41
03.	2013	470.465.949.932,97	2.421.958.180.024,97	19,41
04.	2014	450.420.951.741,00	2.077.427.096.030,00	21,66

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, tren kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2014 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Balikpapan selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan.

Peran Pajak Daerah di Kota Balikpapan terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2010-2012 tingkat kontribusinya mengalami peningkatan. diproyeksi 2014 kontribusinya mengalami peningkatan besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.11
Kontribusi Pajak Terhadap PAD

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) = ((3)/(4))
01.	2010	88.442.340.406,00	143.796.987.896,96	61,51
02.	2011	170.370.071.078,00	231.674.530.575,89	73,54
03.	2012	261.094.566.470,47	340.503.244.597,14	76,68
04.	2013	340.998.751.947,69	470.465.949.932,97	72,34
05.	2014	298.029.544.611,00	450.420.951.741,00	66,22

b. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi

dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Balikpapan sejak tahun 2011.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Balikpapan dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2012) rata-rata berkisar 64,54 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan mulai tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.8 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2010	884.535.994.856,00	1.243.280.145.452,69	71,15
02.	2011	1.151.703.793.532.,00	1.798.988.467.397,89	64,02
03.	2012	1.338.672.315.591,00	2.205.153.356.919,20	63,36
04.	2013	669.955.801.300,00	2.421.958.180.024,97	52,91
05.	2014	1.176.771.223.989,00	2.077.427.096.030,00	56,62

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Balikpapan bersumber dari:

- 1) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak

Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;

- 3) Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Balikpapan. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2010 – 2012 terus mengalami kenaikan, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel III. 9 sebagai berikut.

Tabel 3.13
Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Balikpapan

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2010	254.947.162.700,00	1.243.280.145.452,69	20,51
02.	2011	415.610.143.290,00	1.798.988.467.397,89	23,10
03.	2012	433.792.294.200,00	2.205.153.356.919,20	19,63
04.	2013	396.448.836.000,00	2.421.958.180.024,97	16,35
05.	2014	450.234.920.300,00	2.077.427.096.030,00	21,66

Dari berbagai pertimbangan di atas, target Pendapatan Daerah di Kota Balikpapan Tahun 2014 dan proyeksi 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Balikpapan Target Tahun
2014 dan Proyeksi 2015 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2014	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2015
(1)	(2)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	450.420.951.741,00	454,319,000,000.00
1.1.1	Hasil Pajak daerah	298.029.544.611	302,945,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	71.482.371.579	68,303,000,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	29.500.000.000	31,500,000,000.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.409.035.551	51,571,000,000.00
1.2	Dana Perimbangan	1.176.771.223.989	1,168,780,000,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	718.799.721.989	718,780,000,000.00
1.2.2	DAU	449.982.262.000	450,000,000,000.00
1.2.3	DAK	7.989.240.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	450.234.920.300	338,624,000,000.00
1.3.1	Hibah	8.900.000.000	3,000,000,000.00
1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	241.017.600.000	242,000,000,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.623.367.000	93,624,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	106.693.953.300	-
	PENDAPATAN DAERAH	2.077.427.096.030	1,961,723,000,000.00

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Balikpapan selama kurun waktu 2014-2015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kota Balikpapan berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.

2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan antara lain dengan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
 - i. Meningkatkan SDM pelayanan untuk mengoptimalkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)
 - ii. Meningkatkan sarana dan prasarana dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - iii. Mengintensifkan objek-objek Retribusi Daerah baru dengan mengubah Peraturan Daerah terkait Retribusi Daerah di Kota Balikpapan
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru.
 - c. Penyesuaian besaran tarif, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
 - f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu /terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kota Balikpapan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
6. Menegakan hukum/*law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Balikpapan.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Balikpapan, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan Daerah, melalui tahapan dengan kegiatan Musrenbang, selanjutnya terhimpun Rencana Kerja Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Di dalam RKPD tersebut termuat belanja daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, dengan diklasifikasikan dalam belanja menurut urusan pemerintahan yang terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib terdiri dari :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan terdiri dari :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan; dan
- g. industri

Kebijakan umum belanja daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, rencana belanja daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.2.959.740.595.670,80,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.647.252.346,20 dari tahun 2014 sebesar Rp. 3,003,387,848,017.00. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 862,190,000,000.00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.097.550.595.670.8;
2. Kebijakan alokasi anggaran belanja tahun 2014 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. Oleh karena itu program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2015 diprioritaskan untuk mencapai target RPJMD Tahun 2011-2016, dengan diselaraskan pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, serta mengacu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018.
3. Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
4. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:

- a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
 - b. Mengefektifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan untuk menjamin program dan kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya.
5. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah melalui:
- a. Pengembangan dan pemantapan sistem informasi keuangan daerah melalui dari perencanaan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
 - b. Peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan daerah.
 - c. Penciptaan pola pengawasan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel.

a. Kebijakan Belanja Pegawai.

Belanja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 747.390.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 55,362,578,329.00 dari Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 692.027.421.671.

b. Kebijakan Belanja Bunga

Untuk Belanja Bunga sudah tidak ada lagi, karena telah dilunasi pada Tahun Anggaran 2010.

c. Kebijakan Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan pagu tersebut disediakan untuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Demikian pula dengan belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 dan bantuan ini diberikan bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya suatu resiko sosial di masyarakat.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka mengantisipasi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, maka

pada tahun anggaran 2015 disediakan pagu belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

3.2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan Daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran.

Berdasarkan penerimaan tahun 2014, maka penerimaan pembiayaan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.031.517.595.670.80,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah) dialokasikan sebesar Rp.33.500.000.000,- dan Pembayaran Pokok Utang sudah tidak ada lagi.